

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perkumpulan masyarakat terdapat beragam macam hubungan antar para anggota di dalam masyarakat, yaitu suatu hubungan yang lahir karena berbagai kepentingan anggota masyarakat. Dengan beragamnya hubungan ini, mereka membutuhkan suatu peraturan yang mampu memberi jaminan keseimbangan supaya di dalam suatu hubungan itu tidak terjadi suatu kegaduhan didalam masyarakat. Untuk dapat menjamin keberlangsungan keseimbangan dalam hubungan antar para warga masyarakat, dibutuhkan peraturan hukum yang dibuat atas kemauan setiap anggota masyarakat itu. Setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, akan diberikan sanksi yaitu hukuman sebagai reaksi atas perilaku melawan hukum yang telah dilakukannya. Demi menjaga supaya peraturan hukum itu mampu berlangsung secara terus-menerus serta dapat diterima oleh semua warga masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak diperbolehkan bertentangan dengan asas keadilan dari masyarakat tersebut.<sup>1</sup>

Pada buku yang memiliki judul “Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan”, Prof. Subekti, S.H., menyatakan bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yang dalam pokoknya adalah untuk mendatangkan kemakmuran serta kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Prof. Subekti, S.H., hukum melayani tujuan negara dengan menyelenggarakan “keadilan” serta “ketertiban” syarat

---

<sup>1</sup> C.S.T. Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40

pokok untuk mendatangkan kemakmuran serta kebahagiaan. Selanjutnya ditegaskan, bahwa keadilan itu sekiranya mampu digambarkan sebagai suatu situasi keseimbangan yang membawa ketenteraman di dalam hati orang, serta jika diusik atau dilanggar maka akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.<sup>2</sup>

Kehadiran hukum pidana di Indonesia memiliki fungsi untuk melawan kelakuan dan tindakan yang tidak normal. Menurut Hart, fungsi hukum pidana adalah untuk menjaga keteraturan dan kesusilaan umum serta melindungi warga dari apa yang disebut asusila atau yang merugikan dan untuk memberikan perlindungan atas eksploitasi dari pihak lain, khususnya bagi mereka yang lemah karena masih muda, lemah fisik, pikiran atau pengalaman.<sup>3</sup> Hukum pidana hadir untuk menjaga ketertiban umum serta memberi keabsahan kepada negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan umum. Dimana dalam kepentingan umum tersebut juga terdapat kepentingan individu yang juga turut dilindungi oleh hukum pidana.

Munculnya internet adalah satu dari berbagai penemuan yang berharga, karena dengan adanya internet kita mampu mendapatkan berbagai informasi yang kita butuhkan, serta setiap orang mampu berkomunikasi menggunakan internet walaupun berada di jarak yang jauh. Seiring berkembangnya zaman, akses internet semakin mudah serta meluas. Hal ini didukung dengan semakin banyaknya berbagai tempat yang dilengkapi dengan fasilitas *wi-fi* dan kartu *provider* yang memberikan penawaran paket internet melalui telepon seluler

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> H.L.A Hart, dikutip dari Eddy O.S. Hiarij. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm 30

dengan tarif yang relative terjangkau. Sehingga, setiap orang mampu mengakses berbagai situs termasuk media sosial dengan lebih mudah.

Jejaring sosial adalah suatu situs internet dimana semua orang dapat membuat alamat internet pribadi, lalu tersambung dengan setiap orang serta teman mereka dengan tujuan untuk dapat berbagi informasi serta berkomunikasi secara virtual. Beberapa jejaring sosial yang memiliki anggota yang cukup besar antara lain adalah *Facebook*, *Myspace*, *Plurk*, serta *Twitter*. Jika media tradisional masih menggunakan media cetak serta media siaran langsung, maka media sosial sudah menggunakan internet. Media sosial mengajak siapapun yang berminat untuk bergabung dengan memberi kontribusi serta masukan secara terbuka, memberikan komentar, dan berbagi informasi dalam durasi yang cepat dan tidak terbatas.

Hal tersebut lalu berdampak pada ruang publik yang sebelumnya terbatas pada lingkup individu dengan masyarakat serta lingkungan sekitarnya meluas termasuk didalamnya dunia maya sebagai sebuah ruang publik. Hubungan yang tercipta antar setiap individu didalam dunia maya juga mengakibatkan perselisihan antar individu ataupun antar kelompok di dalam masyarakat, bahkan tidak jarang permasalahan yang sebelumnya hanya terjadi di dunia nyata lalu dibawa ke dunia maya yang seyogyanya merupakan sarana berinteraksi sosial masa kini.

Keberadaan media sosial pada kalangan usia remaja membuat para remaja dapat berhungan dengan teman lamanya. Akan tetapi dengan adanya media sosial di kalangan remaja ini dirasa juga memberi dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari media social adalah adanya tindakan

*bullying*. *Bullying* menurut bahasa Indonesia memiliki artian mengintimidasi atau juga mengganggu orang yang lemah, baik secara individu ataupun secara berkelompok.

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet ini menyebabkan kejahatan baru di bidang ini juga muncul, salah satunya yakni perundungan di dunia siber atau biasa disebut dengan *cyber bullying* yang merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Sehingga hal ini mendasari penulis untuk melakukan kajian lebih dalam terkait dengan pengaturan *cyber bullying* di Indonesia, terlebih pada unsur-unsur yang terdapat didalamnya. Dengan adanya fenomena ini maka negara pun dituntut untuk dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat sehingga dapat menekan angka tindak pidana perundungan di dunia siber atau yang biasa disebut dengan *cyber bullying*.

Sebagian besar dari kita hanya mengetahui perundungan yang dilakukan secara langsung kepada target dengan melakukan kontak fisik maupun kontak secara verbal. Namun sekarang ini, perundungan atau *bullying* tidak hanya terjadi pada kehidupan nyata, namun *bullying* pada saat ini juga terjadi pada dunia internet atau siber. *Bullying* yang dilakukan di internet dijuluki dengan *cyber bullying*. *Cyber bullying* pada dasarnya sama dengan *bullying* yang dilakukan secara langsung, yaitu berupa suatu tindakan yang sama-sama mengintimidasi atau mengganggu seseorang yang lemah, perundungan di dunia siber ini seringkali terjadi di media sosial. Yang menjadi pembeda antara perundungan di dunia siber dengan perundungan biasa

merupakan lokasi di mana seorang pelaku perundungan melakukan intimidasi, ancaman, serta pelecehan terhadap target.

*Cyber bullying* relative lebih mudah untuk dilakukan daripada kekerasan secara langsung karena pelaku tidak harus berhadapan secara langsung dengan orang yang menjadi targetnya. Korban yang terkena *cyber bullying* pun sedikit yang melaporkan kepada kepolisian, sehingga banyak orang tua yang tidak mengetahui bahwa anak mereka telah menjadi korban dari perundungan di dunia maya.

Negara Indonesia telah memiliki peraturan yang mengatur tentang perundungan di dunia siber atau yang biasa dikenal dengan *cyber bullying*. Regulasi mengenai perlindungan terhadap perundungan di dunia siber telah dirumuskan secara khusus pada UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perilaku yang tidak diperbolehkan di dalam UU ITE, terkait dengan perundungan di dunia siber tercantum dalam Pasal 45 Huruf B yang berbunyi sebagai berikut;

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”

Pada penjelasan pasal 45 Huruf B memuat sanksi yang juga dapat diberlakukan bagi pelaku perundungan di dunia siber, yang berbunyi sebagai berikut;

“Ketentuan dalam Pasal ini termasuk juga di dalamnya perundungan di dunia siber (cyber bullying) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil”

Hal ini berbeda dengan Negara lain seperti Korea Selatan yang telah lebih *concern* terhadap pengaturan mengenai *cyber bullying* seperti yang termuat dalam “*Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence in Schools*”. Pada peraturan ini, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap para korban yang mayoritas merupakan siswa sekolah, sehingga pada peraturan mencakup tentang pengertian terhadap perilaku perundungan baik secara langsung maupun di dunia maya, yang salah satunya berbunyi sebagai berikut;

*“The term “bullying” means any form of constant or repeated actions whereby at least two students inflict physical or emotional harm on a specific student or a specific group of students inside or outside of school premises, and then inflict pain thereon;”*<sup>4</sup>

Serta pada negara North Carolina, dimana telah terdapat peraturan yang mengatur tentang *cyber bullying*, seperti yang termuat Pada poin a dalam Undang-undang *North Carolina Article 60 Computer Related Crime*<sup>5</sup>

Alasan penulis membandingkan dengan negara Korea Selatan dan North Carolina adalah karena peraturan yang terdapat di kedua negara tersebut

---

<sup>4</sup> Statute Of The Republic Of Korea, *Act On The Prevention Of And Countermeasures Against Violence In Schools*, [http://elaw.klri.re.kr/eng\\_mobile/viewer.do?hseq=24031&type=new&key=](http://elaw.klri.re.kr/eng_mobile/viewer.do?hseq=24031&type=new&key=), di akses pada 16 Januari 2018

<sup>5</sup> Justitia US Law, *North Carolina Article 60 Computer Related Crime*, <https://law.justia.com/codes/north-carolina/2014/chapter-14/article-60/section-14-458.1/>, diakses pada 2 Februari 2018

memuat aturan yang mengatur baik dari unsur maupun pengertian dari perundungan di dunia siber, meski negara Korea Selatan dan North Carolina memiliki sistem hukum yang berbeda dengan yang berlaku di Indonesia, namun pengaturan terkait dengan *cyber bullying* di kedua negara ini dinilai mampu mengakomodir kebutuhan hukum dimana di Indonesia belum diatur secara lebih spesifik. Sehingga dalam penelitian ini, penulis akan berfokus pada perbandingan pengaturan tentang *cyber bullying* antara kedua negara tersebut dengan pengaturan tentang *cyber bullying* yang ada di Indonesia. Hal inilah menjadi pertimbangan penulis untuk melakukan perbandingan dengan negara tersebut.

Undang-undang yang ada di Indonesia belum dapat mengakomodir kebutuhan hukum masyarakat, dimana terdapat celah dalam penerapan hukumnya. Unsur dari perundungan di dunia siber yang berupa tindakan yang memuat ancaman kekerasan atau menakut-nakuti serta mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil ini sulit untuk dibuktikan, mengingat pelaku yang merupakan anonim dan tidak bertatap muka secara langsung dengan korban dapat dengan leluasa melakukan perundungan di media sosial. Hal ini juga dapat menyulitkan penegak hukum dalam menentukan tuntutan karena tindakan yang dilakukan tidak secara langsung sehingga bila tidak terdapat bukti yang kuat maka pelaku akan tetap dapat bebas dari jeratan hukum.

Sehingga hal ini tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemidanaan terhadap pelaku perundungan yang ditujukan secara bebas di media sosial bila tidak terdapat peraturan yang mampu menjangkau para pelaku perundungan di

media sosial tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa peristiwa perundungan di media sosial, yaitu Yoga yang nekat menabrakan dirinya ke kereta api yang sedang melintas pada tanggal 26 Mei 2013.<sup>6</sup> Yoga nekat bunuh diri karena mendapatkan tekanan dan hujatan akibat gagalnya acara musik dimana ia menjadi ketua event organizernya. Pada kenyataannya, kematiannya dinyatakan sebagai tindakan bunuh diri dan para pelaku yang melakukan tekanan terhadap Yoga di Twitter tidak dikenakan sanksi apapun karena tidak terlibat secara langsung atau secara fisik dalam kematian Yoga. Sehingga hal ini memperlihatkan bahwa peraturan yang ada kurang mampu memenuhi kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Perundungan secara online juga dialami oleh Sonya Depari<sup>7</sup>. Sonya depari merupakan seorang siswi SMU asal Medan yang di-*bully* di media social, setelah video dirinya yang berdebat dengan seorang polwan dan mengaku sebagai seorang anak Jenderal Badan Narkotika Nasional (BNN) yakni Arman Depari tersebar luas di internet. Sonya dapat dikatakan sebagai korban *cyber bullying*. Netizen yang geram dengan perilakunya memperlakukan Sonya sebagai seseorang yang dianggap telah salah besar dan patut untuk dihina. Sehingga hal ini menimbulkan dampak bagi kehidupan

---

<sup>6</sup> Hal ini sesuai dengan berita yang dimuat pada CNN Indonesia dalam artikel yang berjudul **Ketika Bullying Berujung Maut**. Yoga Cahyadi mengalami *cyber bullying* melalui Twitter setelah mengalami kegagalan dalam menyelenggarakan suatu acara di Yogyakarta. Donatus Fernanda Putra, **CNN Indonesia, Ketika Bullying Berujung Maut**, <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20140910112008-255-2906/ketika-bullying-berujung-maut>, diakses pada 12 Maret 2018

<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan berita yang dimuat pada CNN Indonesia dalam artikel yang berjudul **Cyber Bullying Bisa Berdampak Hebat pada Sonya Depari**. Setelah video yang memperlihatkan dirinya memaki seorang polisi wanita setelah melakukan pelanggaran lalu lintas menjadi viral, Sonya Depari menerima banyak terror dan ejekkan melalui internet. Issha Harruma, **Republika, Cyber Bullying Bisa Berdampak Hebat pada Sonya Depari**, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/08/o5bfzc335-cyber-bullying-bisa-berdampak-hebat-pada-sonya-depari>, diakses pada 12 Maret 2018



keseharian korban yang terganggu karena *cyber bullying* ini. Korban menjadi enggan untuk pergi keluar rumah, merasa terpuruk dan malu, dikucilkan dan mengurung diri.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka ada urgensinya penulis untuk mengangkat judul **“Kelemahan Pengaturan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perundungan di Dunia Siber (*Cyber bullying*) Dalam Penjelasan Pasal 45 Huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”** Sehingga tidak lagi menimbulkan kekaburan akan pengaturan dan penerapannya.

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan penulis lampirkan mengenai penelitian terdahulu yang pernah berkaitan dengan pembahasan diatas sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terlebih dahulu:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Tahun Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	2015	Ananda Amaliya Syam	Tinjauan Kriminologis Terhadap	1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan	Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan

		(Universitas Hasanuddin )	Kejahatan <i>Cyber bullying</i>	terjadinya kejahatan <i>Cyber bullying</i> ? 2. Bagaimanakah upaya penanggulang an terjadap kejahatan <i>Cyber bullying</i> ?	<i>Cyber bullying</i> serta upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan <i>cyber bullying</i> <b>sedangkan</b> pada penelitian ini penulis membahas tentang kelemahan dalam pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber dalam penjelasan pasal 45 huruf b UU ITE dan alternatif pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber di Indonesia.
2.	2016	Antonius Sanda (Universitas	Tinjauan Yuridis Terhadap Fenomena	1. Apa unsur- unsur yang menjadikan <i>cyber bullying</i>	Penelitian ini membahas tentang unsur-unsur <i>cyber bullying</i> sehingga

		Hasanuddin )	<i>Cyber bullying</i> Sebagai Kejahatan Di Dunia Cyber Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008	sebagai sebuah kejahatan? 2. Bagaimanakah relevansi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 terkait dengan fenomena <i>Cyber bullying</i> ?	dikatakan sebagai bentuk kejahatan serta untuk mengetahui relevansi putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 terkait dengan fenomena <i>Cyber bullying</i> . <b>sedangkan</b> pada penelitian ini penulis membahas tentang kelemahan dalam pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber dalam penjelasan pasal 45 huruf b UU ITE dan alternatif pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber di Indonesia.
2.	2017	Fitriyana Istigfara	Analisis Yuridis	1. apa makna kesusilaan	Penelitian ini membahas

		(Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Makna Kesusilaan Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?  2. Apakah kriteria tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik?	permasalahan tentang kekaburan hukum makna kesusilaan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik <b>sedangkan</b> pada penelitian ini penulis membahas tentang kelemahan dalam pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber dalam penjelasan pasal 45 huruf b UU ITE dan alternatif pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber di Indonesia.
3.	2017	Violita Ariessaputri	Analisis Yuridis	1. Apakah makna pencemaran	Penelitian ini membahas tentang

		(Fakultas Hukum Universitas Brawijaya)	Makna Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor: 292/Pid.Sus/2 012/Pn.Cbn, Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2 013/Pn.Slmn, Putusan	nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan? 2. Apakah makna pencemaran nama baik dalam UU ITE?	makna pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE berdasarkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta apakah makna pencemaran nama baik dalam UU ITE <b>sedangkan</b> pada penelitian ini penulis membahas tentang kelemahan dalam pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber dalam penjelasan pasal 45 huruf b UU ITE dan alternatif pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber di Indonesia.
--	--	---	---	---	---

			Nomor: 232/Pid		
--	--	--	-------------------	--	--

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah kelemahan dalam pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber dalam penjelasan pasal 45 huruf b UU ITE?
2. Bagaimana alternatif pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber di Indonesia?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisa kelemahan dalam pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber dalam penjelasan pasal 45 huruf b UU ITE.
2. Untuk menemukan alternatif pengaturan unsur-unsur tindak pidana perundungan di dunia siber di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Pada penelitian ini diharapkan mampu membawa manfaat dan memperkaya bagi khasanah keilmuan di Indonesia, khususnya dalam kemajuan di bidang Ilmu Hukum untuk menuju generasi bangsa yang kritis dan solutif.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi masyarakat, penyusunan tulisan ini dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah pengetahuan dan memberi informasi mengenai *cyber bullying*, problematikanya dan pendapat yang dihadirkan.

- b. Bagi Pemerintah, dalam hal ini adalah aparat kepolisian dan pihak lainnya yang memiliki wewenang pengambilan kebijakan dalam sektor hukum, penyusunan tulisan ini diharapkan mampu memberikan penjelasan terkait dengan pemaknaan *cyber bullying* dan penanggulangan masalah tersebut.
- c. Bagi penulis, penulisan ini diharapkan memberikan manfaat dalam memperkaya bidang keilmuan terkait dengan pemaknaan *cyber bullying* dan perbandingan pengaturannya dengan negara lain, yaitu Korea Selatan.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas tentang latar belakang terkait dengan perkembangan kejahatan *cyber bullying* di Indonesia serta permasalahan yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang berisi tentang apa saja kelemahan pengaturan unsur-unsur perundungan di dunia siber pada UU ITE, tujuan serta manfaat penulisan, keaslian penulisan, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan mengenai tinjauan-tinjauan umum mengenai ilmu yang berguna sebagai bahan pendukung penulisan skripsi tentang kekuarangan pengaturan unsur *cyber bullying* ini.

### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji tentang kelemahan pengaturan unsur perundungan di dunia siber dalam UU ITE. Dalam bab II ini memuat tentang: pendekatan perundang-undangan serta pendekatan komparatif. Jenis dan sumber bahan hukum yang terdiri dari UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Act on The Prevention Of and Countermeasures Against Violence in Schools*, serta *North Carolina Article 60 Computer Related Crime*. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan melakukan studi dokumen terhadap UU ITE beserta Undang-Undang dari negara lain yang dijadikan perbandingan, studi kepustakaan serta mengundug artikel yang berkaitan dengan penelitian. Teknik analisa bahan hukum yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta melakukan interpretasi gramatikal, dan definisi konseptual yang berisi definisi tentang dunia siber, perundungan, serta *cyber bullying*.

### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang kekurangan dari unsur tindak pidana perundungan di dunia siber serta kriteria baku yang ditetapkan oleh undang-undang dalam menjerat para pelaku perundungan di dunia siber tersebut dengan membandingkan dengan peraturan tentang *cyber bullying* di negara lain yang dalam hal ini peneliti melakukan perbandingan dengan negara Korea Selatan. Sehingga dengan harapan didapatkan rujukan terkait pengertian dan penetapan kriteria pada perundungan di dunia siber tersebut.

### BAB V PENUTUP



Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan yang ditarik oleh penulis berdasarkan hasil rangkuman dari keseluruhan isi dengan disertai saran-saran terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.